

Keamanan Personal Masyarakat Sipil dalam Konflik Bersenjata: Kegagalan Perlindungan Internasional pada Blokade Koridor Lachin (2022–2023)

Wafa^{1*}, Abdullah²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijay, Indonesia

*Email korespondensi: wafaariff02@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterbatasan perlindungan keamanan personal (*personal security*) masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata, dengan fokus pada Blokade Koridor Lachin periode 2022–2023. Masalah utama penelitian ini adalah kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap *human security* secara internasional dan realitas perlindungan di lapangan yang masih didominasi kepentingan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak blokade terhadap dimensi keamanan individu, mengidentifikasi instrumen kedaulatan negara yang digunakan untuk membatasi akses kemanusiaan, serta mengevaluasi keterbatasan struktural mekanisme perlindungan internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatif, menggunakan data sekunder dari laporan lembaga internasional dan kemanusiaan, dokumen resmi, artikel akademik, serta pemberitaan media, yang dianalisis melalui teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blokade menciptakan ancaman sistemik melalui kekerasan fisik struktural, disrupti pola hidup sehari-hari, dan hilangnya kepastian masa depan bagi sekitar 120.000 penduduk etnik Armenia. Kegagalan perlindungan bersumber dari dua mekanisme yang saling memperkuat: instrumentalisasi kedaulatan oleh Azerbaijan dan kelompok geopolitik Russian Peacekeepers dalam menjalankan mandat formalnya. Kesimpulannya, perlindungan masyarakat sipil dalam sistem internasional bersifat rapuh dan bergantung pada kehendak politik negara berdaulat, menegaskan adanya kegagalan institusional struktural dalam implementasi norma *human security*.

Kata Kunci: Keamanan Manusia, Keamanan Personal, Kedaulatan Negara, Koridor Lachin

Personal Security of Civilians in Armed Conflict: The Failure of International Protection in the Lachin Corridor Blockade (2022– 2023)

Abstract

This study examines the limitations of personal security protection for civilians in situations of armed conflict, focusing on the Lachin Corridor Blockade of 2022–2023. The central problem addressed is the gap between the international normative recognition of human security and the realities of protection on the ground, which remain dominated by state sovereignty interests. This study aims to analyze the blockade's impact on the dimensions of individual security, identify the instruments of state sovereignty used to restrict humanitarian access, and evaluate the structural limitations of international protection mechanisms. The method employed is qualitative, using an explanatory case study design, with secondary data drawn from reports by international and humanitarian organizations, official documents, academic articles, and media coverage, analyzed through thematic analysis. The findings show that the blockade created systemic threats through structural physical violence, disruption of daily life patterns, and loss of confidence in the future for approximately 120,000 ethnic Armenian residents. The failure of protection stemmed from two mutually reinforcing mechanisms: the instrumentalization of sovereignty by Azerbaijan and the geopolitical paralysis of the Russian Peacekeepers in fulfilling their formal mandate. In conclusion, civilian protection within the international system remains fragile and dependent on the political will of sovereign states, underscoring a structural institutional failure in the implementation of the human security norm.

Keywords: Human Security, Personal Security, State Sovereignty, Lachin Corridor

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin menandai perubahan mendasar dalam pola ketidakamanan global: ancaman keamanan internasional tidak lagi didominasi oleh perang antarnegara, melainkan oleh konflik bersenjata internal, perang non-internasional, dan kekerasan berkepanjangan di dalam wilayah negara (Newman, 2010). Newman (2010) menjelaskan bahwa ketidakamanan tersebut dialami secara langsung oleh masyarakat sipil melalui kekerasan bersenjata, pembatasan mobilitas, gangguan akses kebutuhan dasar, pengungsian paksa, serta ketidakpastian yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari—pola yang dikonfirmasi oleh kajian krisis kontemporer, yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap warga sipil dalam konflik dan blokade berkepanjangan bersifat multidimensional dan saling beririsan, mulai dari kekerasan fisik, hilangnya pendapatan, kelaparan, hingga terputusnya akses layanan dasar (Kennett et al., 2024; Pongutta et al., 2021; Tymoshenko & Makarenko, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil bukan lagi korban sampingan konflik, melainkan kelompok yang paling terdampak secara langsung, sehingga ukuran keamanan menjadi tidak memadai bila hanya dilihat dari stabilitas teritorial atau kemampuan pertahanan negara (Acharya, 2014; Oluka, 2022).

Pada titik ini, Commission on Human Security (2003) menegaskan bahwa keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara (state-centric security) semakin jelas, karena meskipun keamanan negara dapat dinyatakan terjaga, masyarakat sipil tetap hidup dalam ketakutan, kekurangan, dan kerentanan yang berkepanjangan. Sebagai respons, United Nations Development Programme (1994) memperkenalkan konsep human security yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian keamanan melalui dua prinsip utama, yaitu freedom from fear dan freedom from want. Secara normatif, pengakuan terhadap human security mencerminkan konsensus internasional bahwa perlindungan manusia merupakan tujuan fundamental keamanan, sebagaimana tampak dalam diskursus PBB pasca-Perang Dingin yang menekankan keterkaitan antara keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia (United Nations, 2005). Namun, sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa konsensus normatif ini berjalan beriringan dengan fragmentasi sistem perlindungan global, di mana norma perlindungan manusia kerap berbenturan dengan prinsip kedaulatan negara dan keterbatasan instrumen kolektif untuk menegakkannya (Peter, 2024; Leisering, 2021; Zhang, 2023).

Meski demikian, pengakuan normatif terhadap human security tidak secara otomatis bersifat operasional. Commission on Human Security (2003) berargumen bahwa human security tidak disertai mekanisme institusional yang mampu memaksakan perlindungan manusia secara langsung di dalam wilayah negara berdaulat, sehingga implementasinya tetap bergantung pada struktur sistem internasional yang berpusat pada prinsip kedaulatan negara. Akibatnya, menurut Kaldor (2007), terdapat kesenjangan antara komitmen normatif untuk melindungi manusia dan realitas praktik perlindungan di lapangan, khususnya dalam konteks konflik bersenjata, di mana keselamatan individu sering kali tunduk pada pertimbangan politik dan kepentingan negara. Penelitian ini berangkat dari kajian terdahulu yang menegaskan bahwa keamanan manusia tidak hanya berkaitan dengan absennya konflik, tetapi juga adanya perlindungan efektif terhadap individu dari ancaman fisik maupun psikis (Mumtazinur & Wahyuni, 2021), sekaligus dari temuan bahwa kegagalan perlindungan internasional bukan disebabkan oleh ketiadaan norma,

melainkan oleh lemahnya koordinasi, kapasitas, dan insentif politik untuk mengimplementasikannya secara konsisten (Paşca, 2025; Kiriienko, 2023).

Personal security di tengah keterbatasan perlindungan masyarakat sipil berarti keamanan tidak lagi hanya dipahami sebagai perlindungan negara, tetapi sebagai kemampuan individu untuk mempertahankan hidup, kebebasan, kesehatan, pangan, dan martabat ketika institusi formal gagal melindungi mereka (Newman, 2021; Kiriienko, 2023; Tymoshenko & Makarenko, 2022). Dari tujuh dimensi human security yang diperkenalkan UNDP—ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik—personal security menempati posisi paling mendasar karena berkaitan langsung dengan keselamatan fisik dan kelangsungan hidup manusia (United Nations Development Programme, 1994). Secara logis, tanpa jaminan keselamatan fisik, dimensi human security lainnya kehilangan makna praktis: akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pekerjaan, atau partisipasi politik menjadi tidak relevan apabila individu hidup dalam situasi di mana nyawanya terancam setiap saat (Acharya, 2001a). Karena itu, keterbatasan perlindungan masyarakat sipil tidak hanya meningkatkan risiko cedera atau kematian, tetapi juga mempersempit kapasitas individu untuk menjalankan strategi bertahan hidup sehari-hari dan menikmati hak-hak dasarnya (Newman, 2021; Sprincean et al., 2021; Tymoshenko & Makarenko, 2022).

Dalam konteks konflik bersenjata, kedudukan personal security menjadi semakin krusial karena masyarakat sipil menghadapi risiko kekerasan langsung, pembatasan mobilitas, dan ancaman terhadap keselamatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Commission on Human Security (2003) menekankan bahwa dalam kerangka human security, perlindungan terhadap keselamatan individu secara normatif dipandang sebagai prioritas utama yang seharusnya didahulukan dibandingkan kepentingan keamanan negara atau tujuan strategis lainnya. Ketika perlindungan formal melemah, warga sipil biasanya membangun self-protection melalui pengetahuan lokal, jaringan sosial, netralitas, penghindaran, akomodasi, dan mobilisasi kolektif, tetapi efektivitasnya dibatasi keras oleh pemindahan paksa, kondisi konflik, dan menurunnya akses terhadap informasi maupun sumber daya (Baines & Paddon, 2012; Krause & Kramler, 2022). Bukti lintas krisis juga menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam melindungi kehidupan, menopang pemulihan, dan menjembatani komunitas dengan bantuan, karena mereka lebih lincah, dekat dengan kebutuhan lokal, dan sering bergerak lebih cepat daripada negara atau mekanisme internasional (Andersen & Lundgren, 2026; Pongutta et al., 2021; Kurylo, 2025). Namun, jika blokade membatasi ruang gerak masyarakat sipil, maka perlindungan dari bawah ini ikut melemah: kemampuan komunitas untuk membangun respons kolektif menurun, sementara individu dipaksa menanggung risiko keamanan secara lebih privat dan terfragmentasi (Kurylo, 2025; Andersen & Lundgren, 2026), sebagaimana ditunjukkan Newman (2010) bahwa perlindungan terhadap keselamatan individu dalam praktik internasional sering kali bersifat tidak konsisten, selektif, dan sangat bergantung pada konteks politik.

Pada tahap ini, terlihat bahwa keterbatasan perlindungan personal security bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah struktural dalam sistem internasional. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2019) menjelaskan bahwa perlindungan keselamatan individu dalam konflik bersenjata bukan hak yang otomatis dijamin, melainkan bergantung pada akses yang diberikan negara berdaulat, sehingga bantuan, evakuasi, maupun

perlindungan langsung dapat dibuka, dibatasi, atau ditutup sepihak sesuai kepentingan politik negara yang menguasai wilayah tersebut. Kegagalan perlindungan internasional dalam merespons krisis semacam ini muncul dari mekanisme yang saling memperkuat: fragmentasi global, ketegangan antara perlindungan manusia dan kedaulatan negara, pembatasan instrumen kolektif, serta respons yang berhenti pada langkah darurat jangka pendek tanpa reformasi struktural (Peter, 2024; Leisering, 2021), yang diperparah ketika aktor internasional sulit mengambil tindakan adaptif yang tegas, mandat perlindungan kehilangan otoritas moral, dan intervensi lebih menekankan resiliensi lokal daripada kemampuan memaksa pelaku kekerasan mengubah perilakunya (Flockhart, 2020; Chandler, 2012; Krause & Kramler, 2022). Dengan demikian, perlindungan personal security bersifat sementara, selektif, dan sangat kontekstual, bergantung pada ruang politik yang tersedia pada waktu tertentu (Commission on Human Security, 2003)—bukan karena norma perlindungan tidak ada, melainkan karena koordinasi, kapasitas, dan insentif politik untuk menjangkau warga sipil yang paling terancam tetap tidak memadai (Zhang, 2023; Kiriyyenko, 2023; Oluka, 2022).

Ketegangan antara pengakuan normatif terhadap human security dan realitas perlindungan masyarakat sipil dapat diamati secara konkret dalam berbagai konflik kontemporer, salah satunya melalui Blokade Koridor Lachin pada periode 2022–2023. Koridor Lachin, yang secara normatif dipahami sebagai jalur penghubung kemanusiaan bagi masyarakat sipil di wilayah Nagorno-Karabakh, memperlihatkan bagaimana perlindungan keselamatan individu tidak berjalan sebagai kewajiban yang otomatis (International Crisis Group, 2023). Laporan International Crisis Group (2023) menunjukkan bahwa blokade tersebut telah mengeksklusi sekitar 120.000 penduduk etnik Armenia dari akses vital terhadap pangan dan obat-obatan, sementara United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2023) menambahkan bahwa akses kemanusiaan, mobilitas penduduk, serta layanan dasar tidak ditentukan semata oleh kebutuhan perlindungan manusia, melainkan oleh keputusan politik, kontrol teritorial, dan pertimbangan keamanan negara yang berdaulat. Meskipun terdapat kehadiran aktor internasional dan rujukan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, perlindungan personal security masyarakat sipil dalam konteks ini tetap bersifat tidak stabil dan bergantung pada izin serta negosiasi yang berubah-ubah (Commission on Human Security, 2003). Studi-studi terdahulu mengenai Blokade Koridor Lachin umumnya berfokus pada dampak kemanusiaan yang dialami masyarakat sipil, seperti krisis pangan, kesehatan, dan pengungsian (International Crisis Group, 2023; Pongutta et al., 2021), namun jarang melihat bagaimana instrumen kedaulatan, seperti kontrol perbatasan, secara sengaja digunakan sebagai alat untuk melumpuhkan norma internasional, dan lebih jarang lagi menelusuri bagaimana pelemahan mekanisme self-protection dan peran organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal turut memperburuk kerentanan personal security warga sipil dalam situasi blokade (Baines & Paddon, 2012; Kurylo, 2025; Andersen & Lundgren, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan analitis antara pengakuan normatif terhadap human security dan realitas perlindungan personal security di lapangan, yang menurut United Nations Development Programme (1994) masih sangat bergantung pada izin politik, klaim kedaulatan, dan dinamika kekuasaan negara. Kesenjangan antara ekspektasi normatif global dan realitas restriksi kedaulatan di lapangan inilah yang memunculkan urgensi untuk mempertanyakan kembali efektivitas perlindungan keselamatan individu dalam sistem internasional yang ada saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan analitis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana Blokade Koridor Lachin periode 2022–2023 berdampak terhadap personal security masyarakat sipil etnik Armenia di Nagorno-Karabakh, khususnya dalam dimensi keselamatan fisik, akses pangan, dan layanan kesehatan; (2) mengidentifikasi bagaimana instrumen kedaulatan negara, terutama kontrol perbatasan dan akses kemanusiaan, digunakan secara sengaja sebagai alat untuk membatasi berlakunya norma human security di lapangan; dan (3) mengevaluasi keterbatasan struktural mekanisme perlindungan internasional—baik dari sisi normatif, institusional, maupun kapasitas implementasi—dalam menjamin personal security warga sipil ketika perlindungan formal negara dan mekanisme self-protection berbasis komunitas sama-sama melemah akibat blokade berkepanjangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian empiris mengenai Blokade Koridor Lachin, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap perdebatan mengenai kesenjangan antara norma human security dan realitas kedaulatan negara dalam sistem internasional kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatif (explanatory case study) yang mengacu pada Yin (2014), karena fokus penelitian adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi dalam konteks kontemporer yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti, dengan tujuan menjelaskan hubungan kausal antara kebijakan kedaulatan negara dan kegagalan institusi perlindungan internasional dalam menjamin personal security masyarakat sipil. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang bersifat kontekstual, dinamis, dan sarat makna politik, tanpa mereduksinya menjadi ukuran kuantitatif semata, sehingga mekanisme yang mendasari keterbatasan perlindungan dapat dijelaskan secara mendalam melalui interpretasi terhadap dinamika hubungan antar-aktor (Creswell & Poth, 2018). Blokade Koridor Lachin ditetapkan sebagai unit analisis tunggal (single-case design) yang dipilih secara purposif karena memiliki nilai analitis tinggi (information-rich case) untuk mengidentifikasi pola hubungan antara norma human security dan praktik politik kedaulatan di lapangan (Patton, 2002; Yin, 2014).

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis keterbatasan perlindungan personal security masyarakat sipil selama blokade Koridor Lachin periode 2022–2023, dengan tiga batasan utama. Secara konseptual, analisis difokuskan pada dimensi personal security dalam kerangka human security UNDP (1994), yang mencakup keselamatan individu, ancaman kekerasan fisik, serta gangguan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan. Secara aktor, perhatian dipusatkan pada Azerbaijan sebagai pemegang kontrol teritorial dan pasukan penjaga perdamaian Rusia (Russian peacekeepers) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas stabilitas kawasan, karena keduanya berpengaruh langsung terhadap keputusan buka-tutup akses dan mobilitas penduduk (International Crisis Group, 2023). Secara geografis, fokus penelitian berada pada jalur utama yang menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh, yang menjadi titik kunci untuk melihat dampak pembatasan akses terhadap keamanan masyarakat sipil di sepanjang periode blokade.

Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dihimpun melalui studi dokumentasi dan kepustakaan (document-based research), mencakup laporan resmi organisasi internasional (International Crisis Group, UN OCHA), dokumen dan pernyataan

kebijakan negara terkait, publikasi lembaga kemanusiaan, artikel jurnal akademik terindeks, serta pemberitaan media kredibel yang meliput perkembangan blokade secara langsung. Strategi ini digunakan karena kajian dokumen memungkinkan penelusuran sistematis atas peristiwa yang sudah terjadi tanpa memerlukan akses lapangan langsung ke wilayah konflik yang berisiko tinggi (Bowen, 2009). Untuk menjaga kredibilitas dan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan dan menyilangkan informasi dari kategori sumber yang berbeda guna meminimalisir bias tunggal-sumber (Denzin, 1978; Patton, 2002). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) mengikuti tahapan Braun dan Clarke (2006), yaitu familiarisasi data, pengkodean awal (initial coding), pencarian dan penyusunan tema berdasarkan dimensi personal security, peninjauan ulang tema, hingga interpretasi dan penarikan kesimpulan naratif. Melalui rangkaian tahapan ini, penelitian mampu menjelaskan secara sistematis hubungan antara tindakan aktor, instrumen kedaulatan yang digunakan, dan dampaknya terhadap keamanan individu masyarakat sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Blokade Koridor Lachin (Desember 2022–September 2023) menghadirkan kasus empiris yang kaya untuk mengevaluasi batas operasional norma human security dalam sistem internasional kontemporer. Kronologi eskalasi blokade beserta dampak langsungnya terhadap personal security masyarakat sipil tersaji secara sistematis pada Tabel 1. Analisis terhadap kasus ini menghasilkan tiga temuan yang saling berkaitan: degradasi sistemik personal security masyarakat sipil, mekanisme ganda yang menopang kegagalan perlindungan, serta implikasi struktural berupa protection gap yang bersifat inheren dalam arsitektur keamanan internasional saat ini.

Kronologi pada Tabel 1 menunjukkan pola yang secara analitis penting: eskalasi blokade tidak berlangsung sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian tindakan bertahap yang meningkat secara sistematis selama sembilan bulan, meskipun telah muncul intervensi hukum internasional pada beberapa titik (perintah sementara ECtHR pada Desember 2022, putusan mengikat ICJ pada Februari 2023, serta seruan OHCHR pada Agustus 2023). Pola gradual escalation despite legal intervention ini menjadi temuan awal yang penting: ia menunjukkan bahwa keberadaan norma dan putusan hukum internasional tidak dengan sendirinya menghasilkan kepatuhan aktor negara di lapangan—sebuah pola yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian mekanisme keterbatasan perlindungan.

Manifestasi Ketidakamanan Personal Security

Koridor Lachin adalah jalur darat sepanjang kurang lebih 60 kilometer dan satu-satunya penghubung antara Armenia dengan Nagorno-Karabakh, tempat sekitar 90 persen kebutuhan pangan wilayah tersebut bertumpu (ACAPS, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika blokade dimulai pada 12 Desember 2022, ketiga dimensi personal security dalam kerangka United Nations Development Programme (UNDP, 1994)—security from physical violence, disruptions in the patterns of daily life, dan loss of confidence in tomorrow—terdegradasi secara simultan dan saling memperburuk, bukan secara berurutan atau terisolasi satu sama lain.

Pola degradasi simultan ini perlu dibaca dalam kerangka pergeseran konseptual yang lebih luas dari state-centered security menuju human-centered security, yang menekankan bagaimana individu dapat menjalani kehidupannya secara aman dalam keseharian, bukan sekadar terbebas

dari ancaman militer lintas batas (Acharya, 2001b). Dalam pemahaman ini, keamanan manusia dibangun di atas dua pilar yang saling berkelindan: freedom from fear yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan fisik langsung, dan freedom from want yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan (Acharya, 2001b; United Nations Development Programme, 1994).

Tabel 1. Kronologi Blokade Koridor Lachin dan Dampak pada Personal Security Masyarakat Sipil (2022–2023)

Tanggal	Peristiwa	Dampak pada Personal Security
12 Des 2022	Blokade dimulai; aktivis pro-pemerintah Azerbaijan memblokir jalan koridor	120.000 warga terisolasi; akses pangan, obat-obatan, dan mobilitas terhenti total
13 Des 2022	Pasokan gas diputus pertama kali	Pemanas dan dapur lumpuh di musim dingin
21 Des 2022	ECtHR mengeluarkan perintah sementara	Tidak dipatuhi; blokade berlanjut
9 Jan 2023	Kabel listrik dari Armenia rusak; pemadaman bergilir dimulai	Rumah sakit krisis daya; sekolah tutup
22 Feb 2023	ICJ keluaran putusan mengikat: Azerbaijan wajib buka koridor	Tidak dipatuhi; kepercayaan pada mekanisme internasional mulai runtuh
22 Mar 2023	Pasokan gas terputus total dan permanen	Infrastruktur pemanas lumpuh sepenuhnya
22 Apr 2023	Azerbaijan dirikan pos pemeriksaan militer resmi	Kontrol akses beralih penuh ke Azerbaijan
15 Jun 2023	Azerbaijan larang seluruh konvoi ICRC dan Russian Peacekeepers	Blokade total; tidak ada bantuan yang masuk
6 Jul 2023	ICJ tolak modifikasi putusan Februari	Mekanisme hukum tidak mengubah kondisi lapangan
7 Agt 2023	Pakar PBB (OHCHR) serukan pembukaan blokade	Tidak berdampak di lapangan
15 Agt 2023	Kematian pertama akibat malnutrisi dikonfirmasi Ombudsman Artsakh	95% penduduk malnutrisi; ancaman fisik terkonfirmasi
19–20 Sep 2023	Operasi militer Azerbaijan; Russian Peacekeepers tidak intervensi	Eksodus massal 100.000+ warga dalam hitungan hari
28 Sep 2023	Republik Artsakh dibubarkan secara resmi	Displacement permanen; hilangnya seluruh kemungkinan masa depan

Sumber: ARKA News Agency

Kasus Lachin menjadi ilustrasi empiris yang tajam atas keterkaitan dua pilar tersebut: blokade tidak menghadirkan ancaman kekerasan bersenjata secara langsung dalam sembilan

bulan pertamanya, namun justru melalui pemutusan akses pangan dan energi—sehingga freedom from want yang terdegradasi lebih dulu, pada akhirnya menciptakan kondisi yang mengancam freedom from fear itu sendiri. Temuan ini turut merespons kritik Paris (2001) bahwa cakupan human security terlalu luas sehingga berisiko kehilangan fokus analitis; dalam kasus ini, justru keluasan cakupan tersebut yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana ancaman struktural (kelaparan, kegagalan energi) dan ancaman fisik langsung (risiko kematian, serangan militer) bekerja sebagai satu rangkaian sebab-akibat, bukan dua kategori yang terpisah.

Pada dimensi security from physical violence, temuan menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan fisik tidak hadir semata melalui kekerasan langsung, melainkan melalui kekerasan struktural berlapis. Pemutusan total rantai pasokan pangan memaksa pemerintah lokal memberlakukan sistem penjatahan ketat sejak Januari 2023, yaitu setengah kilogram beras dan satu liter minyak per orang per bulan. Puncak krisis terjadi pada 15 Agustus 2023, ketika Ombudsman Artsakh secara resmi mengonfirmasi kematian pertama akibat chronic malnutrition (Stepanyan, 2023, dikutip dalam ACAPS, 2023), dengan data Administrasi Nagorno-Karabakh menyebutkan 95 persen penduduk mengalami malnutrisi (CNN, 2023). Dampak sistemik blokade terhadap kondisi kesehatan tercermin lebih lanjut dalam data komparatif pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Indikator Kesehatan Nagorno-Karabakh Selama Periode Blokade

Indikator Kesehatan	Perubahan
Kematian akibat penyakit kardiovaskular	Meningkat lebih dari 2 kali lipat
Kematian akibat serangan jantung akut (Juli 2023)	Meningkat 4 kali lipat
Kematian akibat gagal jantung	Meningkat 66%
Kasus stroke serebral baru	Meningkat 26%
Kasus kanker baru terdeteksi	Meningkat 24,3%
Kematian akibat kanker	Meningkat 15,9%
Anemia pada ibu hamil	Mencapai ~90%
Ketersediaan obat di fasilitas kesehatan	Di bawah 50% dari kebutuhan normal

Sumber: Diolah dari Kementerian Kesehatan Nagorno-Karabakh dalam ARKA News Agency (Agustus 2023); *The Lancet* (September 2023); ACAPS (2023). Catatan: Data komparatif ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Nagorno-Karabakh sebagaimana dilaporkan dalam ARKA News Agency, 8 Agustus 2023, dan dikonfirmasi secara independen oleh *The Lancet*, Vol. 402, September 2023, hlm. 835–836, serta ACAPS, "Nagorno-Karabakh: Crisis Overview," September 2023, hlm. 5.

Angka-angka pada Tabel 2 memperkuat temuan bahwa krisis kesehatan yang terjadi bukan gangguan layanan biasa, melainkan konsekuensi langsung dari pemutusan akses yang terencana. Sekelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa blokade menempatkan nyawa penduduk—terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil—dalam risiko yang signifikan (OHCHR, 2023). Temuan ini relevan dengan argumen Acharya (2001b) bahwa personal security merupakan prasyarat minimum bagi terwujudnya dimensi human security lain: dalam kasus Lachin, terputusnya akses pangan dan obat tidak hanya mengancam kesehatan sesaat, tetapi

secara langsung mengurangi angka harapan hidup penduduk, sehingga dimensi kesehatan tidak dapat dipisahkan dari dimensi keselamatan fisik itu sendiri.

Pada dimensi *disruptions in the patterns of daily life*, UNDP (1994) mendefinisikan human security sebagai perlindungan dari gangguan mendadak yang menyakitkan terhadap pola kehidupan di rumah, pekerjaan, maupun komunitas. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa blokade mewujudkan definisi tersebut secara harfiah: Azerbaijan memutus pasokan gas sedikitnya empat kali antara Desember 2022 hingga Februari 2023, dan sejak 22 Maret 2023 pasokan tidak pernah dipulihkan (ACAPS, 2023). Kerusakan kabel listrik pada Januari 2023 memicu pemadaman bergilir enam hingga delapan jam per hari (EVN Report, 2023). Lebih dari 27.000 anak kehilangan akses pendidikan, dan lebih dari 1.100 warga terjebak di luar wilayah tanpa kemungkinan untuk kembali (Amnesty International, 2023). Center for Law and Justice "Tatoyan" Foundation (2023) turut mendokumentasikan bahwa sebagian besar bisnis tutup dan mayoritas penduduk kehilangan sumber penghidupan, menandai lumpuhnya tatanan kehidupan normal secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa disrupsi terhadap pola hidup sehari-hari tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan krisis fisik-material dengan tekanan psikologis jangka panjang, sebagaimana dibahas pada dimensi berikutnya.

Pada dimensi *loss of confidence in tomorrow*, temuan menunjukkan bahwa ketidakpastian kronis terbentuk melalui pola pemutusan infrastruktur yang berulang dan disengaja. Masyarakat tidak dapat memastikan apakah rumah sakit mampu mengoperasikan peralatan medis, apakah pemanas berfungsi malam ini, atau apakah roti masih tersedia keesokan harinya. The Lancet (2023) mencatat bahwa stres kronis akibat ketidakpastian ini berkontribusi langsung terhadap kenaikan angka keguguran dan komplikasi kehamilan—temuan yang selaras dengan data anemia ibu hamil pada Tabel 2. Ketidakpastian ini pada akhirnya tidak berujung pada pemulihan, melainkan pada kepastian yang paling mengerikan: operasi militer Azerbaijan pada 19–20 September 2023 memaksa lebih dari 100.000 warga mengungsi dalam hitungan hari, dan pada 28 September 2023 Republik Artsakh secara resmi dibubarkan (International Court of Justice [ICJ], 2023).

Secara keseluruhan, temuan pada ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa personal security masyarakat sipil Nagorno-Karabakh tidak terdegradasi secara terpisah, melainkan melalui siklus yang saling memperkuat: krisis pangan memperlemah imunitas, yang kemudian memperburuk beban layanan kesehatan yang sudah kritis akibat kekurangan obat-obatan. Kementerian Kesehatan Nagorno-Karabakh melaporkan bahwa ketersediaan obat di fasilitas kesehatan turun di bawah 50 persen dari kebutuhan normal, sementara Médecins Sans Frontières (MSF, 2023) mengonfirmasi bahwa pasokan obat-obatan esensial terputus total sehingga tenaga medis tidak dapat menjalankan prosedur rutin. Seorang dokter bedah anak yang diwawancarai openDemocracy (2023) menggambarkan kondisi di mana hanya satu inkubator yang dapat beroperasi akibat kekurangan listrik, sehingga tiga bayi prematur harus bergantian menggunakannya—sebuah ilustrasi konkret tentang bagaimana krisis energi, kesehatan, dan keselamatan fisik saling terjalin dalam satu titik kegagalan yang sama.

Temuan empiris ini menguatkan argumen Commission on Human Security (2003) bahwa dalam situasi konflik bersenjata, ancaman terhadap masyarakat sipil bersifat berlapis: ia tidak hanya datang dari kekerasan langsung, tetapi juga dari terhambatnya akses terhadap kebutuhan

dasar yang menopang kelangsungan hidup. Blokade Koridor Lachin mewujudkan peringatan tersebut secara empiris dan simultan dalam skala yang mencakup seluruh populasi, sekaligus memberikan bukti konkret bagi tesis yang lebih luas bahwa personal security bukan sekadar ketiadaan kekerasan fisik, melainkan interaksi kompleks antara ancaman fisik, gangguan pola hidup, dan erosi rasa aman terhadap masa depan—suatu pemahaman yang memperluas cara UNDP (1994) semula memaknai dimensi ini secara terpisah-pisah.

Namun demikian, sejauh mana degradasi tiga dimensi ini terjadi tanpa hambatan berarti dari mekanisme perlindungan yang ada juga membuktikan tesis Newman (2010) bahwa meskipun human security berangkat dari tanggung jawab etis untuk mengorientasikan ulang keamanan pada individu, dalam praktiknya negara tetap menjadi penyedia keamanan utama, dan penekanan berlebihan pada kepentingan negara—dalam hal ini, kontrol teritorial Azerbaijan—justru dapat mengorbankan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat sipil secara langsung. Dengan kata lain, ketiga manifestasi ketidakamanan yang teridentifikasi di atas bukan semata konsekuensi dari kondisi geografis atau ketiadaan sumber daya, melainkan hasil dari pilihan politik aktor yang memiliki kendali atas akses. Pemahaman ini membuka analisis pada pertanyaan berikutnya: mekanisme apa yang memungkinkan degradasi personal security berlangsung secara berkelanjutan tanpa intervensi efektif dari aktor bermandat perlindungan, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

Mekanisme Keterbatasan Perlindungan

Kegagalan perlindungan dalam kasus ini merupakan produk dari dua mekanisme yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat, bukan konsekuensi tunggal dari satu aktor. Temuan ini sejalan dengan argumen Tadjbakhsh (2005) bahwa keamanan personal akan memburuk secara sistemik ketika terdapat ketiadaan mekanisme kontrol sipil yang efektif serta ketidakmampuan—atau ketidakmauan—aktor yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia di lapangan. Dalam kasus Lachin, ketidakamanan tidak hanya bersumber dari adanya ancaman itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tetapi juga diperparah secara struktural oleh keterbatasan kapasitas dan kemauan dua aktor yang sama-sama memiliki mandat perlindungan: Azerbaijan sebagai pemegang kontrol teritorial, dan Russian Peacekeepers sebagai penjaga stabilitas kawasan.

Mekanisme pertama adalah instrumentalisasi kedaulatan oleh Azerbaijan. International Crisis Group (ICG, 2023) menyimpulkan bahwa protes yang secara formal memulai blokade pada 12 Desember 2022 diorganisasi oleh pemerintah Azerbaijan, bukan merupakan tindakan sipil spontan—suatu kesimpulan yang diperkuat oleh fakta bahwa para aktivis berhasil melewati pos pemeriksaan Russian Peacekeepers tanpa hambatan (House of Commons Library, 2023). Azerbaijan kemudian memformalkan kontrol akses melalui pendirian pos pemeriksaan militer resmi pada April 2023, lalu melarang seluruh konvoi ICRC serta Russian Peacekeepers membawa bantuan kemanusiaan sejak Juni 2023. EVN Report (2023) menganalisis bahwa pemutusan infrastruktur energi merupakan instrumen tekanan yang terencana, bukan konsekuensi insidental: Azerbaijan memiliki kendali penuh atas pipa gas dan kabel listrik yang melintasi wilayahnya. Meskipun ICJ (2023) pada 22 Februari 2023 mengeluarkan putusan mengikat yang mewajibkan Azerbaijan membuka akses koridor, blokade berlanjut lebih dari tujuh bulan setelahnya. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA, 2023) mencatat bahwa hambatan akses kemanusiaan berlangsung tanpa mekanisme koersif yang

mampu memaksakan kepatuhan negara berdaulat. Pola ini menegaskan bahwa instrumen kedaulatan—kontrol perbatasan, infrastruktur energi, dan izin akses kemanusiaan—tidak digunakan secara insidental, melainkan dikalibrasi secara bertahap dan disengaja sebagai alat tekanan politik, sebagaimana tergambar pada eskalasi bertahap di Tabel 1.

Mekanisme kedua adalah kelompok geopolitik Russian Peacekeepers. Berdasarkan Pernyataan Trilateral 10 November 2020, Russian Peacekeepers memiliki mandat hukum formal untuk menjamin keamanan pergerakan di koridor, namun sejak blokade dimulai mereka tidak mengambil tindakan efektif. Carnegie Endowment for International Peace (2023) menganalisis bahwa setiap upaya membubarkan aktivis Azerbaijan secara paksa akan merusak hubungan Moskow-Baku yang sangat kritis dalam konteks perang di Ukraina dan tekanan sanksi Barat. Perdana Menteri Armenia secara terbuka menyatakan bahwa kontingen Rusia tidak memenuhi kewajibannya untuk mengendalikan koridor (Al Jazeera, 2022). Ketika operasi militer penuh dilancarkan pada September 2023, Russian Peacekeepers tidak melakukan intervensi apa pun dan menarik diri sepenuhnya pada April 2024. Temuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan bukan disebabkan oleh ketiadaan mandat formal—mandat tersebut secara hukum ada dan mengikat—melainkan oleh kalkulasi kepentingan geopolitik yang menempatkan hubungan bilateral Rusia-Azerbaijan di atas kewajiban perlindungan kemanusiaan. Pola ini menguatkan tesis Tadjbakhsh (2005) bahwa ketidakamanan individu memburuk secara sistemik bukan semata karena ketiadaan institusi berwenang, melainkan karena ketiadaan mekanisme efektif yang mampu memaksa institusi tersebut menjalankan mandatnya secara konsisten.

Yang patut dicermati adalah bahwa kedua mekanisme tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat dalam dinamika yang membuat protection gap semakin sulit ditembus. Azerbaijan dapat terus menggunakan instrumen kedaulatan secara kumulatif justru karena Russian Peacekeepers tidak bertindak; dan Russian Peacekeepers tidak bertindak sebagian karena sistem internasional tidak menyediakan insentif yang memadai untuk melakukannya. Ketidakpatuhan Azerbaijan terhadap putusan mengikat ICJ pun tidak menimbulkan konsekuensi diplomatik yang signifikan—Council on Foreign Relations (2023) mencatat bahwa tekanan internasional terhadap Azerbaijan secara konsisten gagal mengubah kalkulasi Baku. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketika aktor dengan mandat perlindungan formal (Russian Peacekeepers) dan aktor dengan otoritas hukum internasional (ICJ) keduanya tidak mampu memaksakan kepatuhan, negara pemegang kontrol teritorial memperoleh ruang gerak yang hampir tidak terbatas untuk mengoperasikan instrumen kedaulatannya tanpa konsekuensi yang berarti. Relasi mutually reinforcing failure inilah yang membedakan kasus Lachin dari sekadar kegagalan tunggal satu aktor, dan yang menjadi titik tolak untuk memahami implikasinya secara lebih struktural pada bagian berikut.

Implikasi Struktural terhadap Norma Human Security

Kasus Blokade Koridor Lachin memperlihatkan bahwa protection gap bukanlah sekadar konsep akademis, melainkan kondisi empiris yang mengakibatkan kematian, penderitaan, dan pengungsian paksa secara masif. Norma human security telah diakui secara global, tercermin dari putusan mengikat ICJ, seruan resmi OHCHR, dan mandat formal Russian Peacekeepers, namun tidak satu pun kerangka normatif tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Commission on Human Security (2003) telah mengingatkan bahwa norma human security tidak disertai mekanisme institusional yang mampu memaksakan perlindungan secara langsung di

wilayah negara berdaulat. Blokade Koridor Lachin memvalidasi peringatan tersebut secara empiris: ketika Azerbaijan memilih tidak mematuhi putusan ICJ (2023), tidak ada instrumen koersif yang dapat mengubah pilihan itu.

Pada tataran struktural, protection gap ini mencerminkan ketegangan yang bersifat inheren antara dua prinsip yang sama-sama diakui dalam sistem internasional: norma human security yang menempatkan manusia sebagai referensi utama keamanan, dan prinsip kedaulatan negara yang menjamin hak negara untuk mengontrol wilayahnya sendiri. Newman (2010) menegaskan bahwa keamanan manusia pada dasarnya bersifat normatif—ia mengajukan tanggung jawab etis untuk mengorientasikan ulang keamanan pada individu—namun dalam praktiknya, negara tetap menjadi penyedia keamanan utama, dan penekanan berlebihan pada keamanan negara justru dapat mengorbankan kesejahteraan masyarakat sipil. Temuan ini juga menjawab kembali kritik Paris (2001) yang mempertanyakan nilai analitis human security akibat cakupannya yang terlalu luas: kasus Lachin justru menunjukkan bahwa kelemahan human security bukan terletak pada cakupan konseptualnya, melainkan pada ketiadaan mekanisme penegakan (enforcement) yang sepadan dengan luasnya pengakuan normatif tersebut. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan human security "terlalu luas untuk dianalisis", melainkan human security "terlalu lemah untuk ditegakkan". Ketegangan ini bukanlah anomali, melainkan warisan arsitektur sistem internasional yang dibangun di atas kedaulatan negara sebagai prinsip pengorganisasian utama. Selama mekanisme perlindungan internasional tidak dilengkapi kapasitas koersif yang dapat melampaui prinsip kedaulatan, perlindungan personal security dalam situasi konflik akan selalu bergantung pada kehendak politik aktor pemegang kendali teritorial—bukan pada kebutuhan kemanusiaan yang bersifat mendesak dan fundamental, sebagaimana ditegaskan pula oleh Tadjbakhsh (2005) bahwa keamanan individu pada akhirnya bergantung pada efektivitas kontrol terhadap institusi yang bertanggung jawab, bukan semata pada keberadaan institusi itu sendiri.

Dengan demikian, kasus Lachin tidak sekadar merepresentasikan krisis kemanusiaan yang terisolasi, melainkan ilustrasi sistemik tentang bagaimana norma human security beroperasi di bawah tekanan realitas geopolitik. Implikasi ini relevan melampaui konteks Kaukasus Selatan: setiap situasi di mana negara menggunakan instrumen kedaulatan untuk membatasi akses kemanusiaan, sementara aktor internasional bermandat perlindungan terhalang oleh kalkulasi kepentingan, akan berpotensi menghasilkan protection gap yang serupa. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan human security sebagai kerangka perlindungan tidak cukup dilakukan melalui perluasan pengakuan normatif semata, melainkan mensyaratkan pengembangan mekanisme operasional yang memiliki kapasitas koersif nyata terhadap negara yang memilih untuk tidak mematuinya. Tanpa infrastruktur penegakan yang demikian, human security akan terus menjadi aspirasi moral yang rapuh di hadapan logika kedaulatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Blokade Koridor Lachin (2022–2023) merupakan bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan terhadap masyarakat sipil ketika norma keamanan internasional berbenturan langsung dengan kepentingan kedaulatan negara. Pertama, analisis terhadap dampak blokade menunjukkan bahwa personal security masyarakat sipil etnik Armenia terdegradasi secara sistemik pada tiga dimensi sekaligus: keselamatan fisik melalui kelaparan struktural dan kematian akibat malnutrisi, disrupsi pola hidup sehari-hari melalui lumpuhnya energi dan layanan pendidikan, serta hilangnya kepercayaan pada masa depan yang berpuncak

pada eksodus massal dan pembubaran Republik Artsakh. Kedua, instrumen kedaulatan negara—kontrol perbatasan, pemutusan infrastruktur energi, serta pembatasan akses kemanusiaan—terbukti digunakan Azerbaijan secara sengaja dan bertahap sebagai alat tekanan politik, bukan sekadar konsekuensi administratif dari situasi konflik.

Ketiga, evaluasi terhadap mekanisme perlindungan internasional mengungkap keterbatasan struktural yang bersifat ganda: kegagalan Russian Peacekeepers menjalankan mandat formalnya akibat kalkulasi geopolitik, serta ketidakmampuan putusan mengikat ICJ dan seruan OHCHR menghasilkan kepatuhan negara di lapangan. Ketiga temuan ini bersama-sama menegaskan bahwa jaminan keselamatan individu masih sangat bergantung pada ruang politik yang diberikan oleh negara, yang sering kali justru menjadi aktor penghambat bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri—sebuah kegagalan yang bersifat struktural, bukan insidental, dalam arsitektur perlindungan sistem internasional saat ini.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca temuannya. Pertama, desain studi kasus tunggal (single-case design) memberikan kedalaman analitis yang tinggi terhadap kasus Lachin, tetapi membatasi generalisasi temuan terhadap konteks blokade atau konflik lain yang memiliki konfigurasi aktor dan kepentingan geopolitik berbeda. Kedua, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder berupa laporan lembaga internasional, pemberitaan media, dan publikasi akademik, tanpa didukung wawancara langsung terhadap masyarakat sipil terdampak, pengambil kebijakan, maupun personel Russian Peacekeepers, sehingga interpretasi terhadap motif dan pengalaman aktor masih bersifat tidak langsung. Ketiga, cakupan temporal penelitian berhenti pada pembubaran Republik Artsakh (September 2023) sehingga belum menjangkau dinamika pascablokade, termasuk proses displacement jangka panjang dan akuntabilitas hukum internasional yang mungkin masih berkembang.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan studi multi-kasus yang membandingkan Blokade Koridor Lachin dengan blokade kemanusiaan serupa di kawasan lain guna menguji sejauh mana pola protection gap yang ditemukan bersifat umum, mengintegrasikan wawancara atau data primer dari pengungsi dan aktor kemanusiaan untuk memperkaya dimensi pengalaman individu, serta mengeksplorasi secara khusus opsi penguatan mekanisme koersif human security—baik melalui reformasi mandat peacekeeping maupun instrumen akuntabilitas hukum internasional—sebagai tindak lanjut atas implikasi struktural yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis, maupun penyusunan artikel ini.

Funding

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

AI Usage Statement

Penulis menggunakan teknologi AI hanya untuk membantu perbaikan tata bahasa, kejelasan kalimat, dan penyuntingan teks. Seluruh isi, interpretasi, dan substansi ilmiah artikel

telah ditinjau oleh penulis, dan penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan serta integritas naskah.

Data Availability

Data penelitian tersedia dari penulis korespondensi dengan permintaan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001a). *Human security: East versus West* (IDSS Working Paper No. 17). Institute of Defence and Strategic Studies.
- Acharya, A. (2001b). Human security: East versus West. *International Journal*, 56(3), 442–460. <https://doi.org/10.1177/002070200105600304>
- Acharya, A. (2014). *Rethinking power, institutions and ideas in world politics: Whose IR?* Routledge.
- Amnesty International. (2023). *Azerbaijan: Blockade of Lachin corridor putting thousands of lives in peril*.
- Andersen, R., & Lundgren, L. (2026). The role(s) of civil society organizations in crisis and disaster management: A systematic literature review. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 37(2). <https://doi.org/10.1017/s0957876526000185> (nomor halaman belum tersedia di penerbit — artikel masih dalam tahap advance access)
- Baines, E., & Paddon, E. (2012). "This is how we survived": Civilian agency and humanitarian protection. *Security Dialogue*, 43(3), 231–247. <https://doi.org/10.1177/0967010612444150>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Center for Law and Justice "Tatoyan" Foundation. (2023). *The humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh resulting from the blockade*.
- Chandler, D. (2012). Resilience and human security: The post-interventionist paradigm. *Security Dialogue*, 43(3), 213–229. <https://doi.org/10.1177/0967010612444151>
- Commission on Human Security. (2003). *Human security now: Protecting and empowering people*. United Nations.
- Council of Europe. (2023). *Observations on the human rights situation of people affected by the conflict* [Information document].
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.

- Flockhart, T. (2020). Is this the end? Resilience, ontological security, and the crisis of the liberal international order. *Contemporary Security Policy*, 41(2), 215–240.
<https://doi.org/10.1080/13523260.2020.1723966>
- Human Rights Watch. (2022). *Azerbaijan: Blockade of only road to Nagorno-Karabakh imperils humanitarian crisis*.
- International Court of Justice. (2023). *Order of 22 February 2023: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*.
- International Crisis Group. (2023a). *Averting a new war between Armenia and Azerbaijan* (Europe Report No. 266). International Crisis Group.
- International Crisis Group. (2023b). *Nagorno-Karabakh: Preventing starvation and renewed conflict*.
- Kaldor, M. (2007). *Human security: Reflections on globalization and intervention*. Polity Press.
- Kennett, P., Lee, S., Kwon, H.-J., & Lutz, R. (2024). Vulnerability and critical human security in the era of COVID-19 and beyond in the UK and South Korea. *Social Policy and Society*, 24(3), 481–497. <https://doi.org/10.1017/s1474746424000344>
- Kiriyenko, T. P. (2023). Ensuring human security through the prism of international legal protection: General theoretical characteristics. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, (4), 27–33. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.3>
- Krause, J., & Kamler, E. (2022). Ceasefires and civilian protection monitoring in Myanmar. *Global Studies Quarterly*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksac005>
- Kurylo, B. (2025). From individual to collective: Vernacular security and Ukrainian civil society in wartime. *Security Dialogue*, 56(5), 575–592.
<https://doi.org/10.1177/09670106251329884>
- Leisering, L. (2021). Social protection responses by states and international organisations to the COVID-19 crisis in the global South: Stopgap or new departure? *Global Social Policy*, 21(3), 396–420. <https://doi.org/10.1177/14680181211029089>
- Mumtazinur, & Wahyuni, Y. S. (2021). Keamanan individu (personal security) dan qanun hukum keluarga: Tinjauan konsep keamanan manusia (human security). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 80–81.
- Newman, E. (2010). Critical human security studies. *Review of International Studies*, 36(1), 77–94. <https://doi.org/10.1017/S0260210510000077>
- Newman, E. (2021). COVID-19: A human security analysis. *Global Society*, 36(4), 431–454.
<https://doi.org/10.1080/13600826.2021.2010034>
- Oluka, N. L. (2022). Covid-19, global crisis and the challenges of human security management in Nigeria. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1), 161–194.
<https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.56427>
- Paris, R. (2001). Human security: Paradigm shift or hot air? *International Security*, 26(2), 87–102. <https://doi.org/10.1162/016228801753191141>
- Paşca, V. (2025). Human security in the context of unconventional security threats: A theoretical approach. *Bulletin of "Carol I" National Defence University*, 14(1).
<https://doi.org/10.53477/2284-9378-25-10> (nomor halaman belum ditemukan di sistem penerbit)

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peter, M. (2024). Global fragmentation and collective security instruments: Weakening the liberal international order from within. *Politics and Governance*, 12, Article 7357. <https://doi.org/10.17645/pag.7357>
- Pongutta, S., Kantamaturapoj, K., Phakdeesettakun, K., & Phonsuk, P. (2021). The social impact of the COVID-19 outbreak on urban slums and the response of civil society organisations: A case study in Bangkok, Thailand. *Heliyon*, 7(5), Article e07161. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07161>
- Sprincean, S., Sohotchi, T.-S., & Mitrofanov, G. (2021). Protection and safety of individuals: Challenges of human security in a global context. *International Relations Plus*, 1(19). [https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1\(19\).22](https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).22)
- Tadjbakhsh, S. (2005). *Human security: Concepts and implications with an application to post-intervention challenges in Afghanistan*. Centre d'Études et de Recherches Internationales.
- Tymoshenko, V., & Makarenko, L. (2022). Political and legal guarantees of human and civil security. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 12(4), 9–16. <https://doi.org/10.56215/04221204.09>
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Humanitarian access constraints in and around Nagorno-Karabakh*.
- United Nations. (2005). *In larger freedom: Towards development, security and human rights for all* (Report of the Secretary-General). United Nations.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Zhang, Q. (2023). International protection mechanism for citizens' personal rights under sudden public health crisis. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 5(15), 91–96. <https://doi.org/10.25236/ijfs.2023.051516>